

**Pengembangan Mutu Sekolah Berbasis Kemitraan:  
Analisis Peran dan Fungsi Komite Sekolah di SMP Islam Al- Azhar 2  
Pejaten Jakarta**

**Sayuti Hamdani**

**Dosen Agama Islam UPN Jakarta**

sayutihamdani@upnvj.ac.id

**Abstrak**

*Kesimpulan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa komite sekolah memiliki tanggung jawab kerjasama bersama para stake holder Pendidikan sebagaimana diatur dalam konstitusi yang terwujud melalui ketetapan Undang – Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 56 ayat 1 : bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite.*

*Masyarakat melalui komite memiliki peran yang diwujudkan melalui kerjasama orang tua siswa melalui komite sekolah (Jami'yyah). Partisipasi komite sekolah di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten yang paling tinggi adalah dukungan dana, support pemikiran, dan tenaga sedangkan peran komite sekolah dalam aspek pengawasan kegiatan dan program sekolah masih lemah.*

*Komite sekolah harus lebih memaksimalkan fungsi dan perannya sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency), Komite Sebagai Badan Pertimbangan Dalam Pengembangan Kurikulum dan Sumber Daya Pendidikan, Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency) Sekolah, Komite sebagai Sebagai badan pengontrol (controlling agency), Badan Penghubung (Mediator Agency) Dengan Orang Tua Dan Masyarakat sehingga komite bisa maksimal membantu sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten*

**Keywords : Kemitraan, Komite Sekolah, Mutu Pendidikan**

**A. LATAR BELAKANG**

Persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya adalah rendahnya mutu atau rendahnya kualitas pada setiap jenjang satuan pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan kompetensi guru, pengadaan bahan ajar dan alat atau media pembelajaran, perbaikan

sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Bagi sebagian sekolah di kota – kota telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang pesat. Namun, sebagiannya mengalami nasib yang sangat memperhatikan.<sup>1</sup>

Menurut Hari Sudrajat rendahnya mutu pendidikan Indonesia dalam peta persaingan dunia Internasional adalah kebijakan pendidikan yang tersentralisasi dan diterapkan kedalam lima kebijakan yaitu:

1. Implementasi kurikulum 1994 dengan suplemennya tahun 1999 dengan karakter pola pembelajaran yang hanya bertujuan untuk memindahkan pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada anak didik, dimana metode ceramah dan sistem hafalan merupakan metode dominan yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam mengajar anak didiknya.
2. Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian hanya berorientasi kepada daya serap kurikulum dan masalah administrasi kelas atas pelaporan guru. Sekolah belum menguji kemampuan rata – rata siswa dalam satu mata pelajaran tertentu
3. Evaluasi pembelajaran lebih cenderung untuk mengevaluasi kualitas hapalan dan daya ingat. Pendidikan harus mengajarkan keterampilan berpikir, keterampilan melakukan observasi, dan keahlian melakukan konstruksi pengetahuan
4. Belum tersentuhnya aspek afektif dan psikomotorik sebagai tolak ukur mutu pendidikan karena pemerintah hanya menilai aspek kognitif seperti hasil UN sebagai tolak ukur mutu secara nasional.
5. Dampak kebijakan yang hanya menjadikan hasil UN sebagai tolak ukur keberhasilan dan penentu kelulusan siswa maka siswa banyak mengambil kelas tambahan diluar jam sekolah untuk mengejar nilai UN setinggi – tingginya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu SMU, 2001),h. 3.

<sup>2</sup>Hari Suderajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Peningkatan Pendidikan Melalui Implementasi KBK*,(Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2005), 39-41.

Terkait masih rendahnya mutu pendidikan nasional banyak faktor yang menyebabkan mengapa mutu pendidikan di Indonesia rendah dan tidak merata diantaranya adalah:

Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* atau input – output analisis yang tidak dilakukan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input yang diperlukan dalam kegiatan produksi seperti peningkatan kompetensi guru, pengadaan bahan ajar dan alat atau media pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.<sup>3</sup>

Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan *secara birokratis sentralistik*, sehingga meningkatnya mutu sekolah sebagai penyelenggara pendidikan yang tergantung keputusan – keputusan birokrasi – birokrasi. Sehingga sekolah menjadi tidak mandiri, kurangnya kreativitas dan motivasi.

Ketiga, minimnya peranan masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan, partisipasi orang tua selama ini sebatas pendukung dana, tapi tidak dilibatkan dalam proses pendidikan seperti mengambil keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas.

Keempat, krisis kepemimpinan, dimana kepala sekolah yang cenderung tidak demokratis, baik dari kepala sekolah terhadap guru atau birokrasi diatas kepala sekolah terhadap sekolah.<sup>4</sup>

Azyumardi Azra salah seorang tokoh pendidikan Islam mengemukakan pendapatnya bahwa ada 5 penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan yaitu: 1) Pendidikan Islam sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan masyarakat sekarang dan akan datang; 2) Sistem pendidikan Islam kebanyakan masih cenderung mengorientasikan diri di bidang - bidang humaniora dan ilmu - ilmu sosial; 3) Usaha pembaharuan pendidikan Islam sering bersifat sepotong - potong dan tidak komprehensif sehingga tidak terjadi perubahan esensial;

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional...,h. 4.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional., h.4.

4) Pendidikan Islam tetap berorientasi pada masa silam ketimbang berorientasi pada masa depan; 5) Tidak melakukan perbaikan maupun pelaksanaan pendidikan.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Nurkholis upaya perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia kurang berhasil karna beberapa faktor yaitu :

Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana sebuah pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) dapat menghasilkan output (keluaran) yang berkualitas dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro oriented*, diatur oleh birokrasi ditingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang di proyeksikan ditingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya ditingkat mikro (sekolah). hal ini menunjukkan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Ketiga, guru. Pada sisi guru yang merupakan ujung tombak, rendahnya profesionalisme dalam hal penguasaan materi pembelajaran, penguasaan metode mengajar, kretivitas, kemampuan meengevaluasi, mengelola kelas, serta membimbing siswa masih menjadi masalah tersendiri.

Keempat, kurangngnya saran prasarana pendidikan. Masih banyak di temui bangunan sekolah yang rusak, buku ajar siswa yang belum memadai, perpustakaan dan laboratorium yang belum refresentatif.<sup>6</sup>

Sedangkan Sulistiyo memiliki pandangan yang berbeda tentang penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah: 1) Faktor manajemen dan kepemimpinan, Pada sisi manajemen dalam pengelolaan pendidikan kepala sekolah cenderung kaku, Birokratis dan belum

---

<sup>5</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*,(Jakarta: Logos, 1999), h. 85.

<sup>6</sup>Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori Dan Aplikasi*,(Jakarta: Gramedia, 2003), h. 78.

sepenuhnya mampu mengembangkan potensi siswa. Selain birokrasi pendidikan tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk merancang program dan melaksanakannya dengan berbasis kualitas pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan lebih menitik beratkan kepada *input* dan *output* sitem pembelajaran kepada siswa. Padahal proses pendidikan dan pengajaran kepada siswa juga harus dilakukan secara baik;

2) Pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan lebih menitik beratkan kepada *input* dan *output* dan sistem pembelajaran kepada siswa padahal untuk meningkatkan mutu dunia pendidikan, pendidikan buka sekedar input dan output saja yang harus di utamakan, melainkan proses pendidikan dan pengajaran kepada siswa juga harus di lakukan secara baik;

3) Guru, pada sisi guru yang merupakan ujung tombak, rendahnya profesionalisme dalam hal penguasaan materi pelajaran, penguasaan metode mengajar, kreativitas, kemampuan mengevaluasi, mengelola kelas, serta membimbing siswa menjadi persoalan sendiri;

4) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Banyak ditemui bangunan sekolah yang rusak, buku ajar siswa yang belum memadai dan perpustakaan dan laboratorium yang belum refresentatif;

5) Rendahnya budaya dan partisipasi masyarakat.<sup>7</sup>

Deming berpendapat bahwa masalah mutu pendidikan terletak pada masalah manajemen. Ada lima penyakit yang signifikan dalam konteks pendidikan, yaitu :

Pertama, kurang konstannya tujuan. Deming yakin bahwa hal tersebut merupakan penyakit yang bisa mencegah organisasi untuk mengadopsi mutu sebagai tujuan manajemen.

kedua, pola pikir jangka pendek. Artinya bahwa perlu ada penekanan menuju sebuah visi jangka panjang dan pengembangan kultur perbaikan adalah sesuatu yang dia anjurkan.

Ketiga, berkaitan dengan evaluasi prestasi individu melalui proses penilaian atau tinjauan jangka panjang. Deming menentang skema penilaian

---

<sup>7</sup>Sulistyo, " Pendidikan Karakter Dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Zaman",  
*Jurnal Manajemen Pendidikan* , Vol. 23 No. 5 (Maret 2012): 27.

prestasi karna hanya merupakan solusi jangka panjang. Penilaian terhadap prestasi menyebabkan staf saling berkompetisi sementara yang dibutuhkan adalah penyatuan sebuah tim.

Keempat, rotasi kerja terlalu tinggi. Sekolah - sekolah yang mengalami tingginya pergantian guru mustahil mempertahankan konsistensi tujuan jangka panjang.

Kelima, manajemen yang menggunakan prinsip angka yang tampak. Karna indikator prestasi sebenarnya adalah kegembiraan dan kepuasan pelanggan.<sup>8</sup>

Tujuan dari manajemen mutu pendidikan adalah memelihara dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, yang dijalankan secara sistemik untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Dan pencapaian ini memerlukan sebuah manajemen yang efektif dan kepemimpinan yang kuat agar memenuhi harapan dan keinginan para pelanggan atau masyarakat.<sup>9</sup>Kelemahan sistem pendidikan yang ada adalah karena lemahnya dalam manajemen pendidikan baik pada level makro, meso maupun mikro.<sup>10</sup>

Dalin dan Carron menemukan dalam penelitiannya bahwa kualitas pendidikan lebih ditentukan oleh cara sekolah mengelola sumber daya ketimbang oleh ketersediaan sumber dayanya sendiri. Sumber daya yang ada di sekolah boleh jadi akan menjadi malapetaka bagi semua pihak jika kepala sekolah tidak dapat mengelolanya dengan transparan. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah kemampuan kepala sekolah dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, kedua faktor tersebut yaitu ketersediaan sumber daya dan proses belajar mengajar harus di kelola secara profesional oleh sekolah.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>W.E. Deming, *The Deming Management Method*, (New York: Dodd, 1986), h. 175-176.

<sup>9</sup> Usman, Husaini, *Manajemen ;Teori, Praktik & Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),h. 503.

<sup>10</sup>Diding Nurdin, *Manajemen Pendidikan Dalam Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan*, (Bandung: Imprial Bakti Utama),h. 225.

<sup>11</sup>Anton De Grauwe, *Improving The Quality Of Education Through School Based Management: Learning From International Experiences* (Hamburg: International Institut For Education, 2005), h.123-124.

Momentum peralihan sistem dari orde baru ke sistem demokrasi telah merubah paradigma pendidikan di Indonesia bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat berhak terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui komite dan dewan sekolah.<sup>12</sup> Melalui pasal ini dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis yang didasari pada partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dan transparan.

Hal ini sangat memungkinkan dengan dikeluarkannya Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 yaitu Undang – Undang otonomi daerah yang kemudian diatur oleh peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2004 yaitu adanya penggeseran kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan kecuali agama, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, pradilan, moneter, dan fiskal, yang menurut undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 51 menyatakan bahwa pengadaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah didasarkan pada standar pelayanan minimum dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah.<sup>13</sup>

Pada tahun 2003 pemerintah memberlakukan desentralisasi tata kelola sistem pendidikan dasar dan menengah dengan memberikan otonomi sebagai bagian dari pengalihan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sekolah – sekolah diberi kemandirian untuk mengelola operasional sesuai dengan kebutuhan siswa dan pihak sekolah diminta untuk melibatkan

---

<sup>12</sup>Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 36.

<sup>13</sup>Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 33.

masyarakat sebagaimana yang diusung oleh manajemen berbasis sekolah.<sup>14</sup> MBS memberikan kewenangan pada sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang dikondisikan untuk kebutuhan lokal. Oleh sebab itu, sekolah secara mandiri mengatur kegiatan tersebut tanpa intervensi pusat dalam upaya mencapai peningkatan mutu sekolah dengan karakteristik lokalnya, tanpa harus memperhatikan suplemen kurikulum yang membebani proses pembelajaran. Sebelum desentralisasi, beberapa sekolah di Indonesia sudah ada yang melaksanakan proses Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara mandiri dan mereka mampu mengatasi banyak masalah – masalah yang berkaitan dengan pengembangan sekolah secara internal.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis peran dan fungsi strategis komite sekolah dalam pengembangan mutu sekolah sebagai bentuk implementasi kemitraan sekolah dengan para stakeholder melalui wadah komite sekolah di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif non eksperimental karena beberapa alasan. Pertama, peneliti ini memiliki fungsi kontekstual yakni untuk menggambarkan bentuk sifat dan makna Manajemen Berbasis Sekolah dalam proses kegiatan sekolah. Kedua, hasil dalam penelitian ini disampaikan dalam bentuk penjelasan berupa kata – kata dan bukan dalam bentuk analisis numerik. Ketiga, instrumen penelitian berupa peneliti itu sendiri untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Karena itu hasilnya sangat subjektif bergantung pada kemampuan peneliti.<sup>16</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>14</sup>Staf Bank Dunia, *Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Di Indonesia – Ringkasan Pembangunan Manusia Kawasan Asia Timur Dan Pasifik*, ( Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional, 2013), h.1.

<sup>15</sup>Nanang Fatah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Konteks MBS.*, h.93.

<sup>16</sup>J Amos Hatch, *Doing Qualitative Research In Education Settings* (New York: State University Of New York, 2002), h.89.

pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan analisis deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya.<sup>17</sup>

Danim memberikan gambaran bahwa penelitian deskriptif dengan jenis deskriptif analisis akan ditunjang oleh data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). adapun penelitian kepustakaan adalah menelaah, mengkaji dan mempelajari literatur (refrensi), sedangkan dalam penelitian lapangan, penulis terjun langsung kelapangan atau sekolah melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi guna mendapatkan data yang jelas dan representatif.<sup>18</sup>

Adapun *setting* penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Jalan Siaga Raya Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan (sebagai perwakilan SMP berbasis lembaga pendidikan Islam di bawah YPI (Yayasan Pesantren Islam Al- Azhar).

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Peran Jami'yyah (komite sekolah) di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten

Dengan adanya keputusan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 maka fungsi komite sekolah tidak hanya menampung dan mengelola dana dari masyarakat tetapi juga mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, per tentang tujuan dibentuknya komite sekolah merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka memberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sekolah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.56.

<sup>18</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.108.

<sup>19</sup>Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Jami'yyatul Walidain<sup>20</sup> yang duduk dalam keanggotaan berjumlah 24 orang. Para pengurus komite di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten berasal dari unsur orang tua murid di sekolah Islam Al- Azhar. Untuk masa bakti pengurus Jami'yyah (komite sekolah) adalah selama 2 tahun. Pembentukan pengurus Jami'yyah melalui proses hasil musyawarah. Ketua dan wakil ketua Jami'yyah dipilih dan ditetapkan oleh formatur secara musyawarah mufakat.

Adapun mekanisme pembentukan komite sekolah di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten dimulai dengan mengundang beberapa perwakilan dari pengurus komite sekolah yang lama dengan susunan formatur terdiri dari kepala sekolah sebagai ketua formatur, 2 orang pengurus Jami'yyah periode lama sebagai anggota dan 2 orang guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai anggota. Adapun sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan seksi – seksi dalam kepengurusan jami'yyah dipilih secara mufakat berdasarkan usulan dari ketua dan wakil ketua Jami'yyah terpilih.<sup>21</sup>

Dalam hal meningkatkan mutu pendidikan salah satunya adalah dengan membangun kerjasama dengan masyarakat melalui komite sekolah yang tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah. Kerjasama *stake holder* pendidikan diatur dalam konstitusi yang terwujud melalui ketetapan Undang – Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 56 ayat 1 : masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan

---

<sup>20</sup>Jami'yyatul Walidain merupakan istilah khusus yang digunakan untuk organisasi orang tua murid di sekolah – sekolah Al-Azhar yang memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan sekolah. Jami'yyatul Walidain untuk sekolah – saekolah diluar al- azhar disebut dengan komite sekolah. Tujuan dari Jami'yyah walidain (komite sekolah) ini adalah: (1) Mendorong tumbuhnya perhatian orang tua murid terhadap penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan bermutu, (2)Melakukan kerjasama yang tidak terikat dengan pihak luar (perorangan, organisasi) dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan. Lihat buku panduan pelantikan pengurus jamiyyah SMP/SMA Islam al- Azhar periode 2016-2018.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ari Hariyatiketua Jamiyyah (komite) SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Tanggal 8 November 2017, pkl. 11.00 di ruangan kantor komite dan analisis dokumen buku pedoman kepengurusan Jami'yyah SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten.

pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite.<sup>22</sup>

Lebih lanjut menurut Ditjen Dikdasmen Depdiknas menyebutkan bahwa peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan memiliki indikator kerja salah satunya memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran di sekolah.<sup>23</sup>

Dalam konteks implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten dan sekolah – sekolah dibawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al- Azhar (YPI) keberadaan Jami'yyah (komite) sangat membantu sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Pada pasal 18 tentang kewajiban pengurus Jami'yyah (komite) sekolah – sekolah dibawah naungnn Yayasan Al- Azhar (YPI) disebutkan bahwa kewajiban pengurus komite adalah:

- 1) Menciptakan kehidupan yang Islami dalam maupun diluar lingkungan sekolah
- 2) Membantu tercapainya visi dan misi Yayasan Pesantren Islam Al- Azhar (YPI)
- 3) Meningkatkan ukhuwah islamiyah antar anggota
- 4) Mengikuti pembinaan oleh Kepala Sekolah dan Kabid Kemuridan, Jamiyyah dan P3
- 5) Menyusun program kerja tahunan yang dikonsultasikan dengan kepala sekolah
- 6) Menyusun rencana anggaran tahunan yang dikonsultasikan dengan kepala sekolah
- 7) Melaksanakan program kerja tahunan sesuai rencana anggarannya yang disahkan oleh kepala sekolah dan diketahui oleh kbid Murjam dan P3

---

<sup>22</sup> Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta;Kemdiknas

<sup>23</sup> Tim pengembangan komite sekolahDitjen Dikdasmen Depdiknas, indikator kinerja komite sekolah, dalam <http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/>.

- 8) Membuat laporan realisasi program kerja tahunan dan pertanggung jawaban keuangan kepada kepala sekolah dengan tembusan ke kabid Murjam dan P3
- 9) Mengarahkan dan menasehati anggota Jamiyyah yang tidak aktif melaksanakan kewajiban, Mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain setelah dikonsultasikan dengan kepala sekolah, Membantu pengadaan sarana sekolah membantu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.<sup>24</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ari Hariyatiketua Jami'yyah (komite) SMP Islam Al- Azhar 2 pejaten, bahwa keberadaan komite sekolah bukan hanya sebagai pelengkap penderita, tetapi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan sekolah. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 bahwa peran komite sekolah adalah:

- a. Memberikan Pertimbangan Kepada Sekolah (*Advisory Agency*)

Komite sekolah memberikan pertimbangan terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah, memberikan masukan tentang penyusunan anggaran pendapatan belanja sekolah (APBS), pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan APBS. Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan, juga memiliki tugas dalam bentuk memberikan masukan terhadap proses penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pendidikan di sekolah. Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru – guru.

Menurut Intan Assegaf pihak sekolah (kepala sekolah dan staf) menyusun program- program sekolah baik yang bersifat akademik dan non akademik dan disatukan dengan APBS yang kemudian dirapatkan bersama perwakilan Jami'yyah untuk memberikan pertimbangan –

---

<sup>24</sup> Dokumen buku panduan pelantikan pengurus komite SMP/SMA Islam Al- Azhar periode 2016-2018, 31-32.

pertimbangan yang selanjutnya disahkan oleh kepala sekolah dan Jamiyyah.<sup>25</sup>

Pertama, pertimbangan terhadap sarana dan prasarana, sarana dan prasarana adalah sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang menekankan kepada pembelajaran yang menyenangkan (PAIKEM) sehingga peserta didik bisa belajar dengan optimal. Menurut Ari Haryati wujud kerjasama sekolah dengan masyarakat melalui komite sekolah, komite sekolah memiliki komitmen bersama sekolah untuk berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten melalui: pertama, Memberikan dukungan dana, melalui komite sekolah dan orang tua murid dengan mengeluarkan iuran di awal tahun sebanyak 200 ribu perorang untuk menunjang setiap kegiatan sekolah dan apabila diakhir tahun terdapat sisa dari iuran orang tua siswa maka akan digunakan untuk membeli kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran; kedua, Terlibat dalam proses perencanaan kegiatan sekolah dan menentukan pendanaan masing – masing kegiatan; ketiga, Memberikan masukan dan mendiskusikan kegiatan – kegiatan yang perlu dilaksanakan di sekolah.<sup>26</sup>

Hal senada disampaikan oleh Andi kusuma Neswati wakil ketua komite sekolah SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten bahwa peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan yang hubungannya dengan sarana dan prasarana dilihat dari prioritas yang ada, dimana kebutuhan sarana yang mendesak akan didahulukan. Contohnya dengan adanya sisa anggaran komite pada akhir tahun sesuai dengan kesepakatan wali murid, sekolah dan komite maka digunakan untuk melengkapi sarana yang terdapat di laboratorium komputer.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Intan Assegaf Bendahara Jami'yyah (komite) SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tanggal 7 November 2017, pkl. 14.00 di ruangan komite.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Ari Hariyatiketua Jamiyyah (komite) SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Tanggal 8 November 2017, pkl. 11.00 di ruangan kantor komite.

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Andi kusuma Neswati wakil ketua Jamiyyah (komite) SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Tanggal 8 November 2017, pkl. 8.00 di ruangan kantor komite.

Menurut Ali Subkhan kontribusi komite sekolah sangat penting sebagai mitra kerja dalam mendukung terwujudnya setiap program sekolah utamanya terkait masalah finansial. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBS pada awal tahun mereka akan dilibatkan untuk mewakili para orang tua murid. Didalam melaksanakan program kerjanya dalam memberikan masukan dan pertimbangan, baik untuk program fisik dan non fisik, seperti bidang sarana dan prasarana, kurikulum, pengajuan anggaran dan lain – lain.<sup>28</sup>

Kedua, pertimbangan terhadap pengelolaan pendidikan. Proses berjalannya kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan nyaman dan efektif menjadi prioritas sekolah dan komite. Oleh karena itu, apabila ada kekurangan dari pelayanan sekolah dalam memberikan kenyamanan kepada siswa pada saat proses KBM maka komite sekolah akan memberikan pertimbangan dan akan didiskusikan pada saat rapat komite. Fungsi komite dalam memberikan pertimbangan untuk pengelolaan pendidikan bertujuan untuk :Mendorong tumbuhnya perhatian orang tua murid terhadap penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu; Melakukan kerjasama yang tidak terikat terhadap pihak luar (perorangan, organisasi) dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan; Dan mendukung terhadap setiap program sekolah dalam memenuhi standar nasional pendidikan dan standar pendidikan YPI Al-Azhar.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran PAIKEM, komite sekolah melimpahkan kepada sekolah.

Ketiga, pertimbangan terhadap kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum komite menyerahkan ke pihak sekolah karena kurikulum sekarang lebih menyesuaikan dari pemerintah. Hanya saja untuk muatan lokal wali murid melalui komite bisa memberikan masukan ke sekolah.

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Ali Subkhan Kepala SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tanggal 7 November 2017, pkl. 08.00 di ruangan kepala sekolah.

<sup>29</sup>Analisis dokumen buku panduan pelantikan pengurus komite SMP/SMA Islam Al-Azhar periode 2016-2018.

Seperti yang dijelaskan oleh Ali Subkhan bahwa berdasarkan usulan dari komite, sekolah telah memasukkan 3 pelajaran muatan lokal, yaitu:

1. Muatan Lokal Pendidikan Al- Quran,

Adapun pertimbangan dimasukkannya mata pelajaran pendidikan Al- Quran adalah untuk membantu siswa dalam mengembangkan kompetensi membaca Al- Quran, menanamkan kesadaran membaca Al-Quran dan meningkatkan pemahaman tentang isi kandungan Al- Quran

2. Muatan Lokal Bahasa Arab Qurani

Untuk mata pelajaran muatan lokal Bahasa Arab Qurani bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan mengembangkan kompetensi membaca huruf arab yang digunakan dalam Al- Quran, peserta didik memiliki kesadaran tentang pentingnya Bahasa Arab dalam memahami ajaran agama yang bersumber dari Al- Quran dan hadis.

3. Kelas Tahfiz.

untuk program kelas tahfiz bertujuan untuk mengembangkan hafalan peserta didik yang ingin melanjutkan hafalan mereka sebelum masuk ke SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten, dan untuk menumbuhkan kesadaran mereka untuk membaca, dan menumbuhkan sikap penting memahami dan menghafal Al- Quran sejak dini.<sup>30</sup>

Apa yang disampaikan oleh Ali Subkhan kepala sekolah SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten dikuatkan lagi oleh Ari Hariyatiketua Jami'yyah (komite) bahwa adanya usulan untuk memasukkan Muatan Lokal Pendidikan Al- Quran dan membuka program kelas tahfiz adalah dari aspirasi orang tua murid yang disampaikan dalam rapat pengurus komite dan orang tua murid. Adapun pertimbangan dimasukkannya muatan lokal pendidikan Al-Quran, Bahasa Arab dan program kelas Tahfiz adalah untuk membina sebagian siswa yang belum lancar dalam membaca Al- Quran dan mengembangkan hafalan sebagian siswa yang

---

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Ali Subkhan Kepala SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tanggal 7 November 2017, pkl. 08.00 di ruangan kepala sekolah.

sudah menghafal sebelum mereka masuk ke SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten.<sup>31</sup>

b. Peran Komite Sebagai Pendukung (*supporting agency*) kegiatan sekolah

Bentuk peran komite sebagai badan pendukung (*supporting agency*) terwujud dalam bentuk finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam pelaksanaan pendidikan. Adapun bentuk dukungan komite sebagai badan pendukung (*supporting agency*) ke pihak sekolah SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten adalah :

Pertama, dukungan dana (*supporting financial*). Ali Subkhan menyatakan bahwa komite dan sekolah telah membangun hubungan mitra dengan baik, orang tua murid melalui komite menjadi Donatur dalam menunjang kegiatan dan sarana sekolah.<sup>32</sup> Melalui rapat komite yang dihadiri oleh pengurus komite, orang tua murid dan kepala sekolah telah disepakati untuk mengeluarkan iuran komite sejumlah 200 ribu perwali murid dengan tujuan untuk mendukung program – program sekolah, dan diakhir tahun jika terdapat sisa anggaran maka akan digunakan untuk pembelian sarana sekolah.<sup>33</sup>

Menurut Intan Assegaf selain bentuk dukungan orang tua murid melalui komite dalam bentuk dukungan dana, komite juga berperan mencari donatur yang bersifat tidak mengikat untuk kegiatan – kegiatan sekolah. Adapun program tahunan sekolah adalah: Santunan anak yatim, dan amaliyah Qurban, yang dilakukan setahun sekali, untuk santunan anak yatim dilakukan setiap bulan ramadhan dan amaliyah Qurban dilakukan setiap hari raya Idul Adha; acara COSMICAL (Competition Sport, Music, And Art Al- Azhar 2 dilaksanakan setahun sekali yang dimotori oleh persatuan pengurus OSIS setiap angkatan. Kegiatan ini

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Ari Hariyatiketua Jami'yyah (komite) SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Tanggal 8 November 2017, pkl. 11.00 di ruangan kantor komite.

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Ali Subkhan Kepala SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tanggal 7 November 2017, pkl. 08.00 di ruangan kepala sekolah.

<sup>33</sup> Hasil observasi Penulis pada rapat komite, orang tua murid dan sekolah di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tanggal 7 November 2017, pkl. 08.00 di ruangan rapat.

berupa lomba basket, putsal, olimpiade IPA, tari, musik, story telling antar SD dan SMP se Jakarta Selatan dan diakhiri dengan pentas seni.<sup>34</sup>

Kedua, sekolah dalam pembinaan pendidikan, menurut Ari Haryati dalam melakukan pembinaan kepada siswa komite sekolah dengan sekolah melakukan kerjasama dengan pihak – pihak instansi terkait seperti:

1. Sekolah bekerjasama dengan dinas kesehatan Pasar Minggu untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan
2. Sekolah bekerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberikan sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa
3. Sekolah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mensosialisasikan bahaya narkoba dan pergaulan bebas, tawuran antar pelajar dan bahaya terlibat geng motor kepada para siswa.
4. Membuat program motivasi kepada siswa khususnya untuk siswa kelas IX, nara sumbernya berasal dari orang tua siswa.
5. Melakukan bimbingan konseling kepada siswa, nara sumbernya dari orang tua murid.<sup>35</sup>

Ketiga, sekolah dalam membimbing kegiatan murid, kerjasama sekolah dengan orang tua murid untuk keberhasilan pendidikan di sekolah dapat berbentuk antara lain: menanyakan kegiatan belajarnya di sekolah, mengontrol memantau tugas – tugas sekolah yang harus diselesaikan, memberikan motivasi kepada anak untuk rajin belajar, memantau pergaulan anak di rumah.

c. Peran komite sebagai badan pengontrol (*controlling agency*)

Menurut komite sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) terbentuk dalam beberapa peran, yaitu :

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Intan Assegaf Bendahara Jami'yyah (komite) SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tanggal 7 November 2017, pkl. 14.00 di ruangan komite.

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Ari Hariyatiketua Jami'yyah (komite) SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Tanggal 8 November 2017, pkl. 11.00 di ruangan kantor komite.

*Pertama*, sebagai pengontrol proses perencanaan pendidikan, mengontrol kualitas kebijakan/ kualitas program dan proses perencanaan pendidikan. Menurut Dedeh Mustianingsih komite sekolah dalam melakukan perannya sebagai pengontrol adalah dengan melibatkan komite terlibat dalam rapat – rapat yang membahas kebijakan dan program sekolah, seperti rapat membahas APBS, persiapan menghadapi UN, memantau prestasi siswa dan kegiatan pelajaran siswa.<sup>36</sup>

Menurut Ari Haryati komite dalam menjalankan fungsi controlnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan komite terlibat untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Ikut memberikan pendapat yang terkait dengan kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler.

*Kedua*, peran control output, komite sebagai badan yang memantau hasil ujian akhir, memantau angka mengulang sekolah, memantau angka partisipasi sekolah dalam lomba – lomba. Dalam hal perencanaan, mengontrol proses pengambilan keputusan sekolah, terlibat dalam pengawasan terhadap kualitas sekolah.

Dalam rangka memantau mutu alumni, komite dan sekolah bekerjasama dengan ikatan alumni mengadakan even COSMICAL (Competition Sport, Music, And Art Al- Azhar 2) dilakukan setahun sekali yang dimotori oleh persatuan pengurus OSIS setiap angkatan. Kegiatan ini berupa lomba basket, putsal, olimpiade IPA, tari, musik, story telling antar SD dan SMP se Jakarta Selatan dan diakhiri dengan pentas seni. Program tahun ini bisa menjadi ajang menjalin hubungan antara komite, sekolah, masyarakat sekitar dan alumni, sekaligus memantau kualitas almuni.<sup>37</sup>

#### d. Komite Sebagai Badan Penghubung (*Mediator Agency*) Dengan Orang Tua Dan Masyarakat

---

<sup>36</sup> Wawancara penulis dengan Dedeh Mustianingsih koordinator Bidang Kurikulum di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten pada tanggal 6 November 2017, pkl. 01.00 di ruangan kepala sekolah.

<sup>37</sup>Wawancara penulis dengan Adri Herdiansyah alumni SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten 2016/2017 pada tanggal 13 Oktober 2017, pkl. 08.00 di ruangan OSIS .

Menurut Mulyasa hubungan sekolah melalui komite dengan masyarakat merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah dan masyarakat harus memiliki hubungan yang erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan.<sup>38</sup>

Menurut Ari Haryati komite dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator telah melakukan beberapa hal yaitu:

Pertama, menghubungkan sekolah dengan orang tua siswa. Terkait dengan peran komite sebagai penghubung, komite sekolah mengadakan rapat dengan sekolah dan orang tua siswa, dengan tujuan membahas perkembangan sekolah dan perkembangan program kedepan.

Dalam rapat pertemuan komite, orang tua murid dan sekolah yang dilaksanakan di Aula Serba Guna, sekolah melalui kepala sekolah memberikan sambutan dan menyampaikan maksud diadakannya pertemuan rutin tahunan antara sekolah, komite dan orang tua murid. Melalui rapat tersebut kepala sekolah mensosialisasikan kebijakan – kebijakan baru sekolah. Dalam kebijakan ini misalnya, mengembangkan program Digital Smart Classroom (kelas digital), membuka program pelatihan Tahfiz, program Pesantren Alam yang akan dilaksanakan di Cigombang untuk kelas 8, program Floklor ke Thailand dari tanggal 6-10 November. Hasil dari pertemuan antara komite, sekolah dan orang tua murid adalah :

1. Untuk program Digital Smart Classroom (kelas digital), beberapa orang tua murid tidak setuju dengan alasan khawatir anaknya tidak bisa fokus dalam belajar dan tidak semua wali murid mampu membeli fasilitas seperti iPad

---

<sup>38</sup>Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi Dan Implementasi...*, h.50.

2. Sekolah memberikan solusi dengan memberikan alternatif bahwa Digital Smart Classroom (kelas digital) sebagai kelas pilihan untuk orang tua yang mampu dan siswa yang berminat.
3. Untuk menyukseskan program – program yang ditawarkan sekolah, orang tua murid sepakat mengeluarkan iuran yang dikoordinasi oleh komite sekolah.<sup>39</sup>

Kedua, komite menjadi penghubung dengan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.<sup>40</sup>

Menurut Ali Subkhan adanya hubungan kerjasama antara komite, sekolah dan masyarakat sekitar dari sisi pengembangan kultural dan sosial sekolah dan masyarakat diwujudkan dalam kegiatan – kegiatan diantaranya;

- 1) Sekolah bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam setiap kegiatan keagamaan seperti gebyar Muharram dengan melakukan parade keliling kampung
- 2) Infak kakak asuh yaitu kegiatan pengumpulan dana untuk membantu anak – anak sekolah yang tidak mampu disekitar lingkungan sekolah, pengumpulan dana tersebut dilakukan setiap hari jumat
- 3) Santunan anak yatim, dan amaliyah Qurban, yang dilakukan setahun sekali, untuk santunan anak yatim dilakukan setiap bulan ramadhan dan amaliyah Qurban dilakukan setiap hari raya Idul Adha

---

<sup>39</sup> Analisis dokumen notulen rapat orang tua murid dan sekolah SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten tanggal 12 agustus 2017 di Aula Serba Guna.

<sup>40</sup> Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, 35.

- 4) Bazar murah yaitu kegiatan siswa untuk menjual pakaian – pakaian bekas mereka dengan cara mengundang masyarakat sekitar sekolah.<sup>41</sup>

Selain komite dan sekolah menjalin hubungan dari sisi kultural dan sosial, menurut Ari Haryati komite menjalin hubungan institusional dengan masyarakat sekitar. adalah kerjasama antara sekolah dengan lembaga – lembaga atau instansi – instansi resmi lain. Dengan adanya hubungan ini, sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga lain, baik berupa tenaga pengajar, pemberi ceramah, dan pengembangan materi kurikulum, maupun bantuan yang berupa fasilitas.<sup>42</sup>

Sedangkan bentuk kerjasama sekolah dengan masyarakat sekitar dalam bentuk hubungan institusional diantaranya adalah :

1. Sekolah bekerjasama dengan dinas kesehatan Pasar Minggu untuk memberikan pengobatan gratis kepada warga masyarakat dan khitanan masal pada hari besar perayaan ummat Islam
2. Sekolah bekerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberikan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat
3. Sekolah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mensosialisasikan bahaya narkoba dan pergaulan bebas, tawuran antar pelajar dan bahaya terlibat geng motor kepada para siswa. <sup>43</sup>

## 2. Model Kemitraan Komite Dan Sekolah di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten

Peran serta masyarakat adalah bentuk rasa kepedulian dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Keterlibatan masyarakat bisa dalam berbagai bentuk kegiatan sekolah seperti ikut serta dalam memberikan ide, gagasan, saran, dana, dan keterampilan. Dengan terlibat secara aktif maka diharapkan sinergitas

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Ali Subkhan Kepala SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tanggal 7 November 2017, pkl. 08.00 di ruangan kepala sekolah.

<sup>42</sup> Ngalim Purwanto, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h.187-188.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Ali Subkhan Kepala SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tanggal 7 November 2017, pkl. 08.00 di ruangan kepala sekolah.

antara sekolah dan masyarakat/komite sekolah dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kegiatan dan program sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan.

### 1. Partisipasi dan Kemitraan

Menurut Depdiknes bentuk partisipasi masyarakat/komite sekolah dalam proses penyelenggaraan pendidikan diantaranya adalah: berupa dukungan dana, dukungan material, dukungan pemikiran, dan dukungan tenaga:

#### a. Kemitraan dalam Anggaran Sekolah

Peran komite sekolah di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten sangat penting sebagai mitra kerja dalam mendukung terwujudnya setiap program sekolah utamanya terkait masalah finansial. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan .Komite sekolah, komite sebagai badan pemberi pertimbangan telah menjalankan fungsinya dengan :Memberikan dukungan dana, melalui komite sekolah dan orang tua murid dengan mengeluarkan iuran di awal tahun sebanyak 200 ribu perorang untuk menunjang setiap kegiatan sekolah dan apabila diakhir tahun terdapat sisa dari iuran orang tua siswa maka akan digunakan untuk membeli kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran; terlibat dalam proses perencanaan kegiatan sekolah dan menentukan pendanaan masing – masing kegiatan.

Menurut peneliti komite sebagai badan pemberi pertimbangan masih belum maksimal dalam menjalankan fungsinya karena komite sekolah hanya terlibat dalam proses dan rencana pendanaan program sekolah. Komite sekolah hanya ikut memberikan pengesahan terhadap APBS tetapi minim dalam memberikan identifikasi dan usulan. Pengadaan rapat komite hanya menunggu undangan dari sekolah. Belum maksimal memberikan masukan dan mendiskusikan kegiatan – kegiatan yang perlu dilaksanakan di sekolah.

Menurut Hendarmoko bahwa tujuan pembentukan komite sekolah adalah: Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program; Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh pihak masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; Menciptakan kondisi transparan, akuntabilitas, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, jelaslah bahwa peran komite tidak hanya terlibat dalam masalah dana, khususnya dalam masalah upaya memungut biaya dari orang tua murid, namun lebih jauh dari itu komite sekolah dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan terlibat dalam melahirkan kebijakan – kebijakan program sekolah dalam upaya pelayanan pendidikan yang bermutu, akuntabel dan transparan.

Ali Subkhan menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan pembahasan APBS dibahas bersama pimpinan sekolah dan perwakilan komite sekolah. Setelah penyusunan APBS selesai kemudian dirapatkan untuk memberikan pertimbangan – pertimbangan yang selanjutnya disahkan oleh kepala sekolah dan Jamiyyah.<sup>45</sup>

Dikuatkan lagi oleh analisis dokumen program kerja tahun pelajaran 2016/2017 Peran komite sekolah di sebagai badan pertimbangan sekolah tidak terlibat dalam proses penyusunan perencanaan program di sekolah seperti kesiswaan, kurikulum, dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah sepenuhnya menyerahkan kepada sekolah di SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten karena dalam pembahasan program kerja bidang organisasi sekolah dihadiri oleh pimpinan sekolah dan guru.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Hendarmoko, Efektifitas Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Komite Sekolah Pada Jenjang SMP Negeri dan Swasta Di Kota Madya Jakarta Selatan, *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan*, Vol. 1, No. 1 (2010):32.

<sup>45</sup>Hasil Wawancara dengan Ali Subkhan Kepala SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tanggal 7 November 2017, pkl. 08.00 di ruangan kepala sekolah.

<sup>46</sup>Analisis dokumen buku laporan program kerja tahunan SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan tahun ajaran 2016/2017.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran komite dalam aspek dalam memberikan pertimbangan belum maksimal, karena komite belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan di sekolah. Komite hanya terlibat dalam proses penyusunan perencanaan program di sekolah seperti visi sekolah, misi sekolah dan tujuan sekolah dan pembahasan APBS. Adapun penyusunan perencanaan program di sekolah yang berkaitan dengan kesiswaan, kurikulum, dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah sepenuhnya menyerahkan kepada sekolah.

Dalam penelitian Suwandi hingga saat ini organisasi komite sekolah dalam melakukan kerjasama pendidikan dengan sekolah tidak memiliki konsep perencanaan yang jelas dan jarang melakukan proses perencanaan bersama dalam merancang kegiatan pendidikan yang bisa memajukan sekolah.<sup>47</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Komite sekolah, komite sebagai badan pertimbangan terhadap kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum komite menyerahkan sepenuhnya ke pihak sekolah karena kurikulum sekarang lebih menyesuaikan dari pemerintah. Hanya saja untuk muatan lokal wali murid melalui komite bisa memberikan masukan ke sekolah.

komite dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan dukungan dana dan pikiran menunjukkan Komitmen untuk bersama – sama dengan sekolah meningkatkan mutu pendidikan. Danim menyatakan setiap rupiah atau tenaga yang dikeluarkan oleh setiap orang tua dan masyarakat dalam kerangka kegiatan pendidikan dan pembelajaran hendaknya tidak ditafsirkan sebagai harga sebuah sekolah, melainkan harga dari mutu proses dan produk pendidikan atau pembelajaran yang dikehendaki.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Suwandi, Penyelenggaraan Forum Kerjasama Komite Dan Sekolah Untuk Pendidikan Indonesia, *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, Vol.8, No.2.(2010): 160.

<sup>48</sup>Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah* (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), h.54.

Menurut Hendarmoko terdapat perbedaan terhadap peran komite sebagai badan pendukung aspek dukungan proses belajar mengajar dan pengembangan kurikulum yang rendah, dan dukungan dana (*supporting financial*) baik. Hal ini disebabkan oleh komite sekolah belum memahami tentang peran dan fungsinya yang esensi tentang tugas komite sekolah.<sup>49</sup>

Hasil penelitian Alif dan Soenarto menguatkan pentingnya peran komite dalam aspek dukungan dana dimana komite sekolah harus meningkatkan input anggaran di sekolah melalui partisipasi masyarakat agar dengan anggaran yang besar sekolah dapat melaksanakan program yang bisa memajukan sekolah dan dapat dilakukan pengelolaan bersama antara komite dan sekolah.<sup>50</sup>

#### b. Kemitraan dalam Pemikiran

Komite sekolah sebagai badan pertimbangan sekolah memberi masukan terhadap kebijakan dan program pendidikan di sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan dikatakan bahwa penyusunan perencanaan program di sekolah seperti visi sekolah, misi sekolah dan tujuan sekolah mendapat masukan dari komite sekolah. Demikian juga halnya dengan penyusunan perencanaan program di sekolah yang berkaitan dengan kesiswaan, kurikulum, dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, mendapat pertimbangan dari komite sekolah.<sup>51</sup>

Menurut komite terkait dalam proses pelaksanaan pembelajaran seperti pengelolaan pendidikan dalam terlaksananya pembelajaran dan

---

<sup>49</sup> Hendarmoko, Efektifitas Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Komite Sekolah Pada Jenjang SMP Negeri dan Swasta Di Kota Madya Jakarta Selatan, *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan*, Vol. 1, No. 1 (2010): 14.

<sup>50</sup> Alif dan Suenarto, Peran Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan SMK Di Diy ' *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, (2008): 146.

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan

khususnya yang berkaitan dengan program kurikulum maka komite melimpahkan kepada sekolah. Menurut peneliti salah satu penyebab lemahnya kontribusi komite sebagai badan pertimbangan kurikulum adalah komite sekolah tidak mengetahui dengan baik tugas tentang peran mereka sebagai badan pertimbangan pengelolaan pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang kurikulum.

Pernyataan komite diatas, dikuatkan kembali oleh Ali Subkhan bahwa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan pengembangan kurikulum, komite menyerahkan ke pihak sekolah disebabkan karena kurikulum sekarang lebih menyesuaikan dari pemerintah dan faktor kesibukan komite. Hanya saja untuk muatan lokal dan program ekstrakurikuler wali murid melalui komite bisa memberikan masukan ke sekolah dan berkontribusi mengembangkan kegiatan dan program.

Menurut hasil penelitian Siskandar bahwa 45,33% komite sekolah kurang berhasil pada komponen memberi pertimbangan kepada sekolah dalam rangka mengembangkan kurikulum. Hal ini berhubungan dengan tingkat pemahaman komite tentang kurikulum, materi dan strategi dalam melaksanakan kurikulum dan faktor kesibukan komite sehingga lebih menyerahkan sepenuhnya ke sekolah.<sup>52</sup>

Terkait peran komite sebagai badan pertimbangan sekolah pada aspek pendukung pengelolaan sumber daya pendidikan seperti memberikan pertimbangan tentang kekurangan guru, memberikan pertimbangan tentang anggaran sekolah dan pertimbangan tentang sarana sekolah diserahkan kepada Yayasan Pesantren Islam Al- Azhar (YPI) sebagai penanggung jawab manajemen sekolah – sekolah dibawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al- Azhar, sehingga peran komite pada aspek sebagai badan pertimbangan sekolah pada aspek pengelolaan sumber daya pendidikan tidak maksimal.

Menurut kepala sekolah dalam pengelolaan sumber daya pendidikan dan memantau kondisi ketenagaan dan peserta didik di

---

<sup>52</sup>Siskandar, Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan..., h.121.

sekolah bahwa dalam melakukan pertimbangan dan pengawasan terhadap guru dan siswa dilimpahkan kepada kepala sekolah yang selama ini memiliki tanggung jawab hierarkis di sekolah.

c. Kemitraan dalam Ketenagaan

Adapun peran komite sekolah dalam dukungan tenaga adalah dengan mendukung pembinaan pendidikan, sebagaimana hasil wawancara dengan ketua komite Ari Haryati dalam melakukan pembinaan kepada siswa, komite sekolah sebagai mitra sekolah melakukan kerjasama dengan sekolah untuk menjalin kerjasama dengan pihak – pihak instansi terkait.<sup>53</sup>

Hal diatas juga diperkuat oleh kepala sekolah bahwa komite dalam beberapa kegiatan untuk mendukung pembinaan pendidikan dengan mengadakan program pembinaan kepada siswa.diantara program pembinaan kepada siswa adalah program motivasi untuk siswa kelas IX dan program bimbingan konseling dengan nara sumbernya berasal dari orang tua murid.<sup>54</sup>

Terjalannya kerjasama komite dan sekolah dalam pembinaan murid menunjukkan peran komite untuk dukungan tenaga dalam aspek pembinaan murid berjalan baik. Karena komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Ari Hariyatiketua Jami'yyah (komite) SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten Tanggal 8 November 2017, pkl. 11.00 di ruangan kantor komite.

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan Ali Subkhan Kepala SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tanggal 7 November 2017, pkl. 08.00 di ruangan kepala sekolah.

<sup>55</sup>Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Tentang dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah( Jakarta:sinar grafika, 2016), 36-37.

## 2. Sinergitas Sekolah, Komite dan Masyarakat

Kerjasama atau kemitraan adalah bentuk kerjasama antara sekolah dengan komite dalam sebuah institusi sekolah sangat penting untuk dibangun dan dipelihara karena output sekolah merupakan hasil bersama dari unsur – unsur terkait dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam sistem Manajemen Berbasis Sekolah sekolah memiliki mitra yang disebut komite sekolah yang berfungsi untuk memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah yang terkait dengan kebijakan dan program pendidikan sekolah.

Menurut Saiful Sagala komite sekolah adalah merupakan partner sekolah yang secara bersama – sama mengupayakan kemajuan bagi sekolah itu. Program – program akademik dan non akademik harus mendapatkan dukungan dari komite dan kepala sekolah. Sehingga program tersebut dapat dilaksanakan dengan ketersediaan biaya yang diperlukan. Membangun saling pengertian yang baik, komunikasi yang sehat perlu dibangun antara sekolah dan komite sekolah.<sup>56</sup>

Jami'yyah (Komite sekolah) sebagai badan pertimbangan diharapkan dapat membantu sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten, bantuan yang diberikan tidak saja dalam bentuk material, tetapi dapat lebih dari itu yaitu bantuan moral dan material, dalam bab IV pasal 8 tentang keanggotaan dan pengurusan keanggotaan Jamiyyah (komite sekolah) terdiri dari semua orang tua/wali murid disekolah Al- Azhar.<sup>57</sup>

Oleh karena itu, sebagai bentuk kerjasama komite dengan sekolah sebagai badan pertimbangan, maka anggotanya tidak hanya berasal dari orang tua siswa tetapi berasal dari *stakeholder* yang lain. Keanggotaan komite sekolah dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 bahwa ada 3 unsur

---

<sup>56</sup> Saiful Sagala, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 243.

<sup>57</sup> Dokumen buku panduan pelantikan pengurus komite SMP/SMA Islam Al- Azhar periode 2016-2018, 28.

komite sekolah yaitu: Orang tua/wali murid; Tokoh masyarakat; Tokoh pendidikan.<sup>58</sup>

Menurut Siskandar keterlibatan masyarakat melalui komite dalam penyelenggaraan pendidikan bersifat materi dan non materi, artinya bahwa dengan komite sekolah dapat dilakukan dalam bentuk fisik dan non fisik dan kerjasama keduanya untuk meningkatkan mutu belajar. Dengan adanya komite sekolah sebagai badan pertimbangan dengan terlibat penuh dalam proses identifikasi, dan memberikan masukan – masukan program yang bertujuan untuk kemajuan sekolah.<sup>59</sup>

Menurut Depdiknas Indikator keberhasilan sekolah dalam menjalin kemitraan/ kerjasama diantaranya adalah: 1) Terbentuknya tim kerjasama yang mampu menjalin kemitraan. SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten telah menjalin kerjasama/ kemitraan dengan lembaga pendidikan lain seperti sekolah – sekolah yang berada dibawah YPI al- Azhar. 2) terlaksannya kunjungan atas kerjasama dengan pihak terkait. SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten dalam lima tahun terakhir telah menjalin kerjasama *Sisterschool* dengan sekolah – sekolah di luar negeri (anggota OSCD) seperti program pertukaran budaya (*Folklore Cultural Mission* ke UK) dan melakukan studi banding ( *study trip*) ke Thailand yang diikuti oleh siswa dan guru.

Berdasarkan data pada bab sebelumnya bahwa kerjasama sekolah, komite untuk mendukung kegiatan dan program sekolah dengan berperan mencari donatur yang bersifat tidak mengikat untuk kegiatan – kegiatan sekolah. Kerjasama SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten dengan dinas terkait melalui berbagai kegiatan. Sinkronisasi antara sekolah dan komite telah menghasilkan kerjasama yang baik antara sekolah dan pihak – pihak terkait.

Adapun kerjasama sekolah dengan pemerintah dan masyarakat yang sudah berjalan adalah: 1) kerjasama dengan kepolisian untuk memberikan

---

<sup>58</sup>Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010. Tentang Keanggotaan Dan Kepengurusan Komite Sekolah

<sup>59</sup> Siskandar, Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol. 14, No. 3 (2012):123.

penyuluhan tentang bahaya narkoba dan tawuran pelajar, 2) kerjasama sekolah dengan dinas kesehatan pasar minggu untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan, 3) kerjasama setiap hari besar Islam dengan memberikan santunan yatim dan dhuafa bagi masyarakat sekitar sekolah, 4) parade gebyar Muharram dengan keliling kampung. 5) acara tahunan konser seni kerjasama sekolah dan alumni bersama masyarakat.

Menurut Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah disebutkan bahwa setiap sekolah /Madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses,output, dan pemanfaatan lulusan. Sekolah sekolah perlu membangun strategi untuk membina hubungan kerjasama dengan pihak – pihak terkait melalui pertemuan – pertemuan yang sudah

### C. KESIMPULAN

Melalui komite sekolah yang tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah. Kerjasama *stake holder* pendidikan diatur dalam konstitusi yang terwujud melalui ketetapan Undang – Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 56 ayat 1 : masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite.

Sedangkan Aspek peran serta masyarakat diwujudkan melalui kerjasama orang tua siswa melalui komite sekolah (Jami'yyah). Partisipasi komite sekolah yang paling tinggi adalah dukungan dana, support pemikiran, dan tenaga sedangkan peran komite sekolah t dalam aspek pengawasan kegiatan dan program sekolah masih lemah.

Komite sekolah harus lebih memaksimalkan fungsi dan peranya sebagai Badan Pertimbangan (*Advisory Agency*),Komite Sebagai Badan Pertimbangan Dalam Pengembangan Kurikulum dan Sumber Daya Pendidikan,Sebagai

Badan Pendukung (*Supporting Agency*) Sekolah, Komite sebagai Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*), Badan Penghubung (*Mediator Agency*) Dengan Orang Tua Dan Masyarakat sehingga komite bisa maksimal membantu sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah di SMP Islam Al- Azhar 2 Pejaten

### Daftar Pustaka

- Azra,Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Moderniasasi Menuju Milenium Baru*,Jakarta: Logos, 1999.
- Azwar,Syaifuddin,*Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Arsyad, Azhar,*Media Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ary, D. *Introduction To Research In Education*, Canada: Cengage Learning, 2010.
- A. Locke Edwin and Associaties, *The Essense Succesfully*, Alih Bahasa Oleh Indonesian Translation Dengan Judul *Esensi Kepemimpinan: Empat Kunci Pemimpin Dengan Penuh Keberhasilan*, Jakarta:Mitra Utama, 2002.
- Arifin dan Barnawi, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Arr- Ruzz Media, 2017.
- Asmani, *Komptensi Guru Menyenangkan Dan Profesional* (Yogyakarta: Power Book IHDINA, 2009.
- Bafadal,Ibrahim, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- B. Crosby Philip, *Quality Is Free*,New York : McGraw-HILL Book Co, 1979.
- Cadwel Brian J. Dan SpinkJim M. , *Student Outcomensand The Reform Of Education Beyond The Self-Managing School* ,Hongkong: Graphicraft, 1998.
- De Grauwe, Anton, *Improving The Quality Of Education Through School Based Management: Learning From International Experiences* (Hamburg: International Institut For Education, 2005.
- Deming,W.E. *The Deming Management Method*, New York: Dodd, 1986.
- Deming Dalam Jerome S Arcaro (Diterjemahkan Oleh Yosol Iriantara) *Pendidikan Berbasis Mutu* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Departemen Pendidikan Nassional, 2000.
- Depdiknas, Kurikulum 2004, *Standar Kompetensi Pendidikan Agama Islam Sekolah Menegah Atas Dan Madrasah Aliyah*, (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2003

- Depdiknas RI, Standar Nasional Pendidikan (PP RI No. 19 tahun 2005) (Jakarta:Sinar Cendekia, 2006)
- Dally,Dadang, *Balanced Score Card Suatu Pendekatan Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Danim,Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* ,Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- \_\_\_\_\_ *Otonomi Manajemen Sekolah*,Bandung: Alfabeta, 2010.
- \_\_\_\_\_ *Visi Baru Manajemen Sekolah* ,Jakarta:Bumi Aksara, 2012.
- Darmadi,Hamid, *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Konsep Dasar dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Gaspersz,Vincent, *Manajemen Kualitas: Penerapan Konsep – Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total*,Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Hatch, J. Amos, *Doing Qualitative Research In Education Settings*,New York: State University Of New York, 2002.
- Hadis dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan* ( Bandung: Alfabeta, 2012.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
- Mulyasa,Dedy, *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing*,Bandung: Remaja Rosda Karya,2011.
- Malik Fajar,Abdul, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*,Jakarta: LP3NI, 1998.
- Moleong,Lexi J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2010.
- Mulyasana, Dedy *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- M. Arifin, Barnawi, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Arr- Ruzz Media, 2017.
- Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*,Bogor: Ghalia Indonesia,2004, Cet Ke- 3.
- Nurdin,Diding, *Manajemen Pendidikan Dalam Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan*,Bandung: Imprial Bakti Utama, 2007.

- Nawawi, Hadari *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 19 Tahun 2007 *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan mutu Pendidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 tahun 2007 Tentang
- Sudrajat, Hari, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Bandung: Cipta Cetas Grafika, 2005.
- S. Arcaro, Jerome, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip – Prinsip Dan Tata Langkah Penerapan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sagala, Saiful, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi Dan Pemberdayaan Potensi Sekolah Dalam Sistem Otonomi Sekolah*, Jakarta: Alfabeta, 2011.
- Sallis, Edawar, *Total Quality Management In Education*, Alih Bahasa Ali Riyadi & Fahruurozi, Jogjakarta: IRCiSod, 2008.
- Sergiovanni, Thomas, "Leadership Of Education" Dalam Thomas Sergiovanni (Ed), *Rethinking Leadership (a Collection Of Articles)*, California: Crowin Press, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, Cet. Ke- 23, 2016
- Suryosubroto, B. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, Cetakaan Ketiga, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Umairo Dan Gozali, Imam, *Manajemen Mutu Sekolah Di Era Otonomi Pendidikan*, Yogyakarta: Ircisod, 2010.

### Jurnal – Jurnal dan Makalah

- Alif dan Suenarto, Peran Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan SMK Di Diy ‘  
*Jurnal Peneltian Dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Hendarmoko, Efektifitas Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Komite Sekolah Pada  
Jenjang SMP Negeri dan Swasta Di Kota Madya Jakarta Selatan, *Jurnal  
Lingkar Mutu Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, 2010.
- Krismanda, Mutia Ayu Pengembangan Model Kemitraan Sekolah Dengan  
Orang Tua Siswa Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Mutu  
Berbasis Sekolah Di Sekolah Menengah Swasta, *Jurnal Manajemen  
Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, 2017
- Siskandar, Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,  
*Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol. 14, No. 3 (2012)
- Suti, Marsus, ” Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan”, *Jurnal  
MEDTEK*, Volume 3, Nomor 2 Oktober 2011.
- Sutrisno Dan Rusli, “Analisis Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar  
Dan Menengah Di Propinsi Jambi”, *Jurnal Pendidikan Inovatif* Volume  
3, Nomor 1, September 2007
- Suprayogo, Imam, “ Problem Peningkatan Mutu Madrasah” *Jurnal Ilmiah  
Administrasi Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan*, 1978 -1938 Jurusan  
Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri  
Yogyakarta Dan Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (SnaPI )  
, Vol. 13. No. 7. 2009
- Suwandi, Penyelenggaraan Forum Kerjasama Komite Dan Sekolah Untuk  
Pendidikan Indonesia, *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, Vol. 8,  
No. 2. (2010)